

PENINGKATAN KAPASITAS MODAL SOSIAL DAN KUALITAS PENDAMPING PENGEMBANGAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN

Sumardjo¹

ABSTRACT

Social capital and local indigenous are the key aspect in both sustainable community development and participatory development. Extension workers and community empowerment facilitators are one of the key actors of communication development in realizing quality and prosperity of society life. Extension/empowerment of society organization which involve in modern world progressively do not protect from requirement demand for extension competency as according to demand growth requirement of communication development or extension target. Therefore, there is a need a facilitator's qualification that have adequate standard in sustainable development. The well guaranteed of the competency will only be effective if it is supported through related professional association and the supervision by the institute of certification

Key words: Social capital, local indigenous, community development, sustainable participatory development, community development facilitator

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Modal sosial merupakan unsur sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu bangsa. Dalam menyongsong era globalisasi dan era lepas landas, setiap bangsa memerlukan sumber daya manusia (SDM) dalam perspektif modal sosial yang memiliki keunggulan prima dan memiliki kualitas tinggi yaitu di samping menguasai iptek juga harus memiliki sikap mental dan *soft skill* sesuai dengan kompetensinya. Modal sosial yang besar harus dapat diubah menjadi suatu aset yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Tindakan yang cermat dan bijaksana harus dapat diambil dalam membekali dan mempersiapkan modal sosial, sehingga benar-benar menjadi aset pembangunan bangsa yang produktif dan bermanfaat serta berkualitas untuk pendampingan dalam proses pengembangan masyarakat.

Dalam perspektif modal sosial, konsep "SDM" (human resources) merupakan satu kesatuan yang utuh dalam sistem sosialnya dan memiliki potensi yang tinggi dalam pengembangan masyarakat berkelanjutan. Manusia harus dilihat secara lebih utuh, sehingga konsep "*social capital*" (modal sosial) tidak dapat dipisahkan. Semakin tinggi kualitas modal modal sosial suatu bangsa, maka semakin tinggi pula tingkat kemajuan bangsa tersebut. Demikian sebaliknya, semakin rendah kualitas modal sosial suatu bangsa akan menjerumuskan pada kemunduran suatu bangsa.

Proses pengembangan masyarakat berkelanjutan memerlukan tenaga pendamping yang berkualitas dan mampu memadukan konsep pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) dan modal sosial secara partisipatif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas modal sosial dan kualitas pendamping pengembangan masyarakat berkelanjutan perlu dilaksanakan secara spesifik lokasi dan mengedepankan aspek pengembangan energi sosial budaya alam.

¹ Kepala Pusat Kajian Resolusi Konflik dan Pemberdayaan LPPM IPB

Permasalahan

Peningkatan kapasitas modal sosial dan kualitas pendamping merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Beberapa permasalahan penting yang mengemuka berkaitan dengan aspek pengembangan masyarakat berkelanjutan adalah: 1) Bagaimana konsep peningkatan kapasitas modal sosial dalam pengembangan masyarakat?; 2) Bagaimana konsep peningkatan kualitas pendamping pengembangan masyarakat dan faktor yang mempengaruhi kualitas pendamping/fasilitator pemberdayaan masyarakat?; dan 3) Nilai utama apakah yang diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait dengan konsep partisipasi dan pengembangan energi sosial budaya kreatif?

Tujuan

Secara umum, tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis aspek penting yang terkait dengan peningkatan kapasitas modal sosial dan kualitas pendamping dalam pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Tujuan khususnya adalah: 1) Menganalisis konsep peningkatan kapasitas modal sosial dalam pengembangan masyarakat; 2) Menganalisis konsep peningkatan kualitas pendamping pengembangan masyarakat dan faktor yang mempengaruhi kualitas pendamping/fasilitator pemberdayaan masyarakat; dan 3) Mengkaji nilai-nilai utama dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait dengan konsep partisipasi dan pengembangan energi sosial budaya kreatif.

PENINGKATAN KAPASITAS MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Modal Sosial dalam Pengembangan Masyarakat

Modal sosial adalah hubungan yang sifatnya *mutual*, kepercayaan, kelembagaan, nilai dan norma sosial lainnya yang berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hubungan tersebut dapat bersifat formal maupun informal. Hubungan formal dalam masyarakat misalnya yang terjadi melalui organisasi masyarakat, kelompok keagamaan, koperasi, partai politik dan sebagainya, sedangkan hubungan sosial yang informal misalnya interaksi sosial antara masyarakat dalam satu lingkungan. Hal yang sangat menentukan dalam penguatan modal sosial adalah intensitas interaksi antara warga masyarakat atau dengan pihak terkait, yang dapat berperan menjadi ruang publik yang partisipatif dan efektif.

Modal sosial adalah kekuatan yang menggerakkan masyarakat, terbentuk melalui berbagai interaksi sosial dan institusi sosial. Menurut salah satu penggagas modal sosial, Robert Putnam, modal sosial adalah bagian dari organisasi sosial berupa hubungan sosial dan rasa saling percaya yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk kepentingan bersama (Putnam 1995). Seperti halnya modal yang lain, modal sosial dapat meningkat dan dapat pula menurun bahkan menghilang. Selanjutnya dikatakan bahwa hasil penelitian Putnam di Italia menggambarkan adanya korelasi positif antara modal sosial dan kinerja pemerintah daerah. Putnam menyimpulkan bahwa modal sosial mempunyai peranan penting dalam penciptaan pemerintah daerah yang responsif dan efisien, yang ditandai dengan adanya

masyarakat yang kuat dan dinamis. Selain itu arus balik kekuasaan dari pusat ke daerah dalam kerangka desentralisasi mensyaratkan partisipasi lokal dalam pembangunan daerah dan modal sosial merupakan kekuatan tidak terlihat yang dapat mendorong keberhasilan partisipasi lokal tersebut. Dengan demikian penting sekali bagi pemerintah daerah memahami ide modal sosial terlebih dalam implementasi kebijakan-kebijakan di daerah dalam kerangka desentralisasi.

Konsep modal sosial berasal dari James Coleman dalam tulisannya yang berjudul '*Social Capital in the Creation of Human Capital*' yang diterbitkan oleh *American Journal of Sociology* tahun 1988. Modal sosial diartikan sebagai aspek-aspek dari struktur hubungan antara individu-individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Konsep ini kemudian dielaborasi terkait dengan isu-isu pembangunan ekonomi masyarakat yang partisipatif, maupun politik. Dikatakan modal sosial apabila mengandung tiga komponen inti, yaitu: 1) kemampuan merajut kelembagaan (crafting institution); 2) adanya partisipasi yang setara dan adil, dan 3) adanya sikap saling percaya.

Agar pengembangan masyarakat berkelanjutan maka model pembangunan yang partisipatif seyogyanya menekankan konsep pengetahuan lokal (indigenous knowledge) dan modal sosial (social capital). Pada saat ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan suatu kasus program yang menampilkan proses pengembangan keswadayaan masyarakat dengan membangun ketiga komponen modal sosial, maupun penggalian pengetahuan lokal tersebut atas inisiatif masyarakat, yang disertai penanaman nilai baru pembangunan ke dalam kebudayaan masyarakat.

Peningkatan Kapasitas Manusia dalam Modal Sosial

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat lebih akses terhadap sumber daya, serta mengembangkan kewenangan untuk itu, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya. Tujuan jangka pendek pemberdayaan sebaiknya jelas (specific), terukur (measurable) dan sederhana (relistic), sehingga merupakan kondisi yang mendorong minat masyarakat untuk mewujudkannya (achievable) dalam waktu tertentu. Tujuan pemberdayaan yang lebih kompleks perlu ada dan sebaiknya ditetapkan sebagai tujuan dalam jangka panjang (vision). Visi yang jelas berpotensi untuk menjadi pemandu kegiatan kerjasama diantara masyarakat untuk menetapkan tujuan-tujuan jangka pendek pemberdayaan, sehingga proses pemberdayaan menjadi lebih terarah, efektif dan efisien. Hal ini disebabkan setiap proses pemberdayaan menuju pada suatu kondisi kehidupan di masa yang mendatang yang lebih jelas.

Tujuan pemberdayaan seyogyanya didasarkan pada kebutuhan riil (real-needs) masyarakat dan bukan hanya sekedar kebutuhan yang dirasakan (felt-need). Idealnya kebutuhan yang dirasakan masyarakat adalah kebutuhan riilnya. Oleh karena itu, siapapun pelaku pemberdayaan semestinya mampu mengenali dengan baik kebutuhan riil masyarakat dan secara dialogis dikomunikasikan sedemikian rupa dengan masyarakat, sehingga menjadi kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam konteks penerapan tanggungjawab sosial perusahaan yang akhir-akhir ini cukup banyak dikembangkan, kebutuhan yang diangkat sebagai tujuan dalam pemberdayaan seyogyanya merupakan konsensus antara pihak-pihak yang mendefinisikan kebutuhan, misalnya pemerintah, perusahaan, masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemberdaya atau pemberi pelayanan serta akademisi/peneliti. Peran pemberdaya mengupayakan dialog antara para pendefinisian kebutuhan sehingga diperoleh konsensus mengenai kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Diutamakan, pendefinisian kebutuhan oleh masyarakat sendiri, dengan cara mengajak orang untuk berdialog dan mengembangkan kemampuan warga untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka yang sesungguhnya (Sumardjo 2009).

Pasang-surut dalam Pengembangan Kapasitas Manusia Pembangunan

Salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan adalah menghargai nilai lokal (*valuing the local*). Prinsip-prinsip ini tersirat oleh gagasan pembangunan yang bersifat "*bottom up*". Prinsip-prinsip ini berpusat pada gagasan untuk menghargai pengetahuan lokal, nilai-nilai, keyakinan, keterampilan, proses dan sumber daya suatu masyarakat. Dengan demikian lebih mudah meyakinkan masyarakat dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan tersebut (Sumardjo 2007).

Pemahaman paradigma dalam pengembangan kapasitas petani bergeser dari masa ke masa. Pada masa sistem pembangunan pertanian yang sentralistik tampak prioritas dalam penyuluhan adalah (Sumardjo 2009) *Better farming, better business, better living*; Masa Transisi Agribisnis-Reformasi adalah *Better business, better farming, better living*; dan Masa Reformasi adalah *Better living, better business, better farming*.

Pada masa pembangunan yang sentralistik teknik produksi dikembangkan secara intensif melalui kegiatan penyuluhan, penelitian dan pelayanan untuk mencapai target-target produksi. Dengan teknik produksi yang baik maka akan terjadi bisnis usahatani yang baik yang selanjutnya diharapkan meningkatkan kualitas hidup. Dalam penyuluhan saat itu dikenal istilah dipaksa-terpaksa-terbiasa, sehingga menjadi apatis. Faktanya, kesejahteraan petani kurang terwujud, bisnis pun kurang berkembang meskipun petani sudah menggunakan teknologi pertanian inovatif.

Konsep agribisnis demikian gencar digerakkan pada awal reformasi dengan prinsip *better business, better farming dan better living*. Utamanya adalah pengembangan kemampuan bisnis, karena dengan kemampuan bisnis yang baik maka petani akan memilih menerapkan teknologi pertanian yang terbaik. Faktanya, sistem agribisnis yang asimetris menyebabkan kemampuan bisnis tetap lemah, karena tersekat-sekat oleh terputusnya informasi hulu-hilir dalam sistem agribisnis. Hasilnya, kesejahteraan petani juga kurang terwujud, karena tidak efektif terjadi perubahan perilaku bisnis, posisi tawar petani tetap rendah.

Dewasa ini, pada akhir dekade reformasi hipotesis muncul yang perlu diutamakan adalah *better living*, dengan kualitas hidup yang baik maka perilaku konsumtif terkendali dan perilaku produktif berkembang, tingkat pendidikan dan pengelolaan keuangan keluarga menjadi kondusif, maka keputusan-keputusan bisnis usahatani menjadi terdukung. Pada kondisi seperti itu, inovasi teknologi lebih

dapat dicerna karena daya nalar yang semakin baik. Pada musim-musim panen raya petani tidak harus buru-buru menjual hasil produksinya dengan harga murah, tetapi melakukan pengolahan hasil untuk mendapatkan nilai tambah. Hasil usahatani ditabung dan diinvestasikan pada usaha produktif, sehingga penghasilan meningkat dan pada gilirannya tersedia dana untuk akses informasi dan akses inovasi di dalam berusahatani.

PENINGKATAN KUALITAS PENDAMPING PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Peningkatan Kualitas Pendamping/Fasilitator Pemberdaya Masyarakat

Agar lembaga penyuluhan atau komunikasi pembangunan berhasil, setidaknya ada empat kondisi yang dibutuhkan dan perlu dikembangkan dalam organisasi penyuluhan tersebut, yaitu: 1) Kejelasan misi; 2) Kejelasan Standar kompetensi profesi penyuluh/fasilitator pemberdaya/pendamping; 3) Aktualisasi informasi/inovasi; dan 4) Penghayatan atas budaya organisasi penyuluhan/pemberdaya masyarakat. Kejelasan misi yang dihayati bersama seluruh personil merupakan prasyarat bagi keberhasilan organisasi profesi pemberdaya masyarakat. Mengingat penyuluh/fasilitator pemberdaya adalah penentu keberhasilan organisasi penyuluhan, maka pengembangan aspek kompetensi penyuluh perlu menjadi perhatian organisasi penyuluhan/pemberdaya masyarakat dalam mengemban misi dan tugas-tugasnya, agar aktivitas dan program dapat lebih difokuskan pada pengembangan kompetensi warga masyarakat terkait yang sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan lingkungan. Penyuluh/fasilitator pemberdaya memiliki kebebasan atau otonomi untuk menentukan seberapa baik untuk mencapai visi dan mengemban misi penyuluhan/pemberdayaan masyarakat, sehingga penyuluh perlu diberi kesempatan untuk akses informasi dan inovasi seluas-luasnya, sehingga dapat berkreasi secara kompeten. Di India, *Cyber Extension* merupakan salah satu solusi yang terbaik untuk itu.

Mengingat penyuluh/pemberdaya masyarakat sebagai pelaku utama dalam komunikasi pembangunan harus mampu beradaptasi dengan lingkungan wilayah kerjanya, maka budaya organisasi yang jelas perlu dikembangkan, misalnya menjunjung nilai (value) berkomunikasi secara asertif, dialogis dan konvergen; mengemban tugasnya secara seimbang, adil dan beradab; berpikir/berorientasi global dalam mengelola sumber daya lokal; hari esok harus lebih baik dari hari ini, dan sebagainya.

Organisasi penyuluhan/pemberdayaan masyarakat yang berkiprah di dunia yang semakin modern tidak terhindar dari tuntutan kebutuhan untuk mengembangkan kompetensi para penyuluh sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan sasaran penyuluhan/komunikasi pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penetapan standar kompetensi bagi seorang penyuluh, agar kinerja penyuluhan dapat diprediksikan arah, dijamin kompetensi dan kinerjanya.

Kompeten diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan (standar). Kebutuhan kompetensi bagi penyuluh/pemberdaya setidaknya disusun berdasarkan dua hal, yaitu: 1) kebutuhan pembangunan masyarakat, dan 2) kebutuhan kompetensi berdasarkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) penyuluh/fasilitator pemberdaya masyarakat.

Standar Kompetensi Pendamping/Fasilitator Pemberdaya Masyarakat

Apa yang dimaksud standar kompetensi, standarisasi kompetensi dan sertifikasi kompetensi ? Standar kompetensi adalah rumusan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas atau syarat jabatan. Dengan dikuasainya kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu: 1) mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan dengan terampil (baik); 2) mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar (cermat); 3) memahami apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula; dan 4) memahami bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

Standardisasi kompetensi adalah proses merumuskan, menetapkan dan memberlakukan, menerapkan dan meninjau kembali standar kompetensi. Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang dan jenjang profesi tertentu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah diakreditasi. Mengapa standarisasi kompetensi dibutuhkan ?

Manfaat kejelasan standar kompetensi ini adalah untuk institusi pendidikan dan pelatihan adalah: 1) Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum; 2) Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, dan sertifikasi. Kemudian, bagi dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja hal ini bermanfaat untuk: 1) Membantu dalam rekrutmen tenaga kerja; 2) Membantu penilaian unjuk kerja; 3) Dipakai untuk membuat uraian jabatan; dan 4) Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri/pertanian. Di lain pihak standar kompetensi bermanfaat Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi, yaitu: 1) Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya; dan 2) Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

Kapan seorang penyuluh/pemberdaya masyarakat sebagai komunikator pembangunan dapat dikategorikan sebagai penyuluh yang kompeten? Seseorang dikatakan sebagai Penyuluh yang kompeten apabila seseorang yang mampu (Sumardjo 2006): 1) mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan penyuluhan dengan terampil untuk memberdayakan orang-orang dalam upaya meraih kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakatnya; 2) mengorganisasikan sistem penyuluhan sehingga efektif memfasilitasi masyarakat dengan cermat agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri; 3) melakukan tindakan yang tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana penyuluhan semula; 4) bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh meski dengan kondisi yang berbeda (local specific); dan 5) mampu mensinergikan kepentingan lokal dengan kepentingan yang lebih luas.

Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendamping/Fasilitator Pemberdaya Masyarakat Pelaku Utama Komunikasi Pembangunan

Pengukuran kompetensi penyuluh/fasilitator pemberdaya masyarakat dapat dilihat dari dimensi-dimensi perilaku (behavior), seperti kognitif, afektif dan psikomotorik atau konatif. Hasil dari implementasi kompetensi penyuluh/fasilitator pemberdaya masyarakat tersebut merupakan kinerja (performance) penyuluh. Pengukuran kompetensi bisa ditempuh dengan empat pendekatan, yaitu: 1) mengamati langsung (observasi) perilaku penyuluh; 2) wawancara terhadap penyuluh atas apa yang telah dilakukannya; 3) mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas penyuluhan/pemberdayaan masyarakat yang mengetahui dengan baik sepak-terjang penyuluh/fasilitator pemberdaya dalam bertugas; dan 4) *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan tugas penyuluh pada yang bersangkutan, misalnya atasan, kolega/teman sejawat, petani (pelaku utama), dan pengusaha (pelaku usaha). Sedang pengukuran kinerja, dapat dilakukan melalui pengamatan hasil kerja penyuluh/fasilitator pemberdaya terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Penyuluh atau pendamping atau fasilitator pemberdaya masyarakat pada dasarnya adalah salah satu pelaku utama komunikasi pembangunan. Beberapa penelitian disertai di beberapa tempat menunjukkan bahwa kompetensi penyuluh pada dekade awal abad 21 terkait dengan tuntutan pembangunan saat itu, dinilai masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian (disertasi) Jelu Ardu Marius (2007) di Nusa Tenggara Timur, Bambang Gatut (2008) di Jawa Barat, serta hasil penelitian behavioral penyuluh lainnya yaitu Herman Subagio (2008) tentang kapasitas petani di Jawa Timur (*dalam* Sumardjo 2008).

Rendahnya kompetensi penyuluh sebagai pelaku utama komunikasi pembangunan ini dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Sejalan dengan implementasi otonomi daerah terjadi melemahnya komitmen pemerintah terhadap penyuluhan. Pada beberapa Pemerintah Daerah kurang memiliki komitmen dukungan terhadap eksistensi dan pengembangan penyuluhan, sehingga kurang menstimulan terjadinya upaya pengembangan kompetensi para penyuluh.
2. Kurang dukungan keberlanjutan pengembangan inovasi dari lembaga pelatihan bagi penyuluh yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan keterbatasan keinovatifan materi yang dibawakan oleh fasilitator dalam lembaga pelatihan bersangkutan yang terkait dengan kebutuhan pengembangan usahatani petani.
3. Kurangnya dukungan inovasi berkelanjutan bagi penyuluh yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pengembangan usahatani dan pemenuhan kebutuhan petani setempat pada saat itu.
4. Perubahan paradigma pembangunan dari *top down* ke partisipatif, yang kurang disertai upaya pemberdayaan penyuluh secara memadai ke arah yang sejalan dengan perubahan paradigma tersebut.
5. Terdapat upaya peningkatan pendidikan formal pada penyuluh namun diduga kuat banyak di antaranya ditempuh melalui proses pembelajaran yang kurang bermutu terkait dengan peningkatan kualitas penyuluhan, karena terjebak pada tuntutan formalitas untuk penyesuaian ijazah dengan tingkatan jabatan fungsional penyuluh.

6. Kurang jelasnya hubungan antara kompetensi penyuluh dengan perkembangan jenjang karir dan insentif bagi perkembangan kompetensi penyuluh.
7. Belum adanya standar kompetensi bagi penyuluh, sehingga menjadi lemah dalam pengembangan kompetensi secara sistematis oleh pihak terkait, maupun dalam rekrutmen tenaga penyuluhan.

NILAI UTAMA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Nilai Utama dalam Pembangunan

Tiga nilai utama (three core value of development), versi Adaro dan Smith (2009) yang perlu dikembangkan dalam pembangunan, yaitu: *sustenance*, *self-esteem* dan *freedom*. *Sustenance* ditandai dengan kemampuan mendapatkan kebutuhan dasar manusia, yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan rasa aman (Ghosh 1984). *Self-esteem* ditandai dengan berlakunya pengakuan sebagai manusia seutuhnya (to be a person) yang merupakan komponen universal kedua terpenting dalam kehidupan yang layak. *Freedom from servitude* adalah adanya iklim kebebasan manusia untuk memilih, yang dipahami sebagai keleluasaan emansipasi dari kondisi alienasi dalam kehidupan, tekanan institusi, dogmasi dalam keyakinan, pelayanan sosial dan khususnya dalam upaya penguatan diri dari kungkungan kemiskinan.

Millenium Development Goals sebagai Sasaran Pembangunan

Pandangan umum tentang pembangunan berkelanjutan mencakup antara lain realitas fisik (ekologis) dan realitas sosial yang mencakup kombinasi atas aspek sosial, ekonomi dan proses-proses kelembagaan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup yang semakin meningkat. Apapun komponen yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, dalam tataran pembangunan di seluruh masyarakat setidaknya mencakup tiga tujuan berikut (Adaro & Smith 2009):

1. *To increase the availability and widen the distribution of basic life-sustaining goods such as food, shelter, health and protection.*
2. *To raise levels of living.* Tercakup di dalamnya adalah peningkatan pendapatan, kesempatan kerja/peluang usaha, peningkatan pendidikan, perhatian yang lebih baik terhadap nilai budaya dan nilai kemanusiaan. Jadi tidak hanya yang bersifat material/fisik, tetapi terutama yang sifatnya peningkatan kualitas kemanusiaan dan kebangsaan (self-esteem).
3. *To expand the range of economic and social choices*, yang secara individual dan kebangsaan lebih memungkinkan mendapatkan keleluasaan meraih akses pelayanan tidak hanya dalam berinteraksi dengan sesamanya dan sebangsanya, tetapi juga keleluasaan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam arti yang lebih luas.

Pada September 2000, sebanyak 198 negara anggota PBB telah mengadopsi delapan *Millenium Development Goals (MDGs)* sebagai wujud nyata komitmen dalam pertumbuhan untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan-tujuan lainnya dalam pembangunan manusia pada tahun 2015. MDGs berupaya memperbaiki dengan fokus pada pengembangan masyarakat, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan mengatasi masalah kelaparan (UNDP 2003). Delapan indikator pembangunan di era milenium meliputi :

1. *Eradicate extreme poverty and hunger*

2. *Achieve universal primary education*
3. *Promote gender equality and empower women*
4. *Reduce Child mortality*
5. *Improve maternal health*
6. *Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases*
7. *Ensure environmental sustainability*
8. *Develop a global partnership for development*

Agar tujuan pembangunan di era milenium benar-benar dapat menyentuh permasalahan yang lebih luas di tingkat masyarakat, maka solusinya adalah pengembangan masyarakat secara partisipatif. Terkait dengan pengembangan masyarakat secara partisipatif dalam implementasi kekinian, konsep modal sosial menjadi sebuah konsep yang diterima secara umum oleh ilmuan sosial dari berbagai disiplin ilmu. Konsep ini kemudian berkembang dengan pesatnya dan menjadi perhatian banyak pihak. Modal sosial bahkan dengan dahsyatnya dianggap sangat berperan dalam pembangunan ekonomi. Selain diterima oleh berbagai kalangan, modal sosial juga menjadi bahan perdebatan antara ilmuan sosiologi, antropologi, politik dan juga ekonomi (Widodo 2008).

Selanjutnya dalam debat tersebut Slamet Widodo menemukan bahwa modal sosial memiliki keunikan yaitu *relational*. Modal ekonomi terdapat pada rekening bank seseorang, modal manusia terdapat pada otaknya dan modal sosial berada pada struktur hubungan antar individu. Untuk mendapatkan modal sosial, seseorang harus berhubungan dengan orang lain dimana diantaranya saling mendapatkan manfaat (Portes *dalam* Narayan 1999; Dasgupta 1997).

Sebagai sebuah bagian dari struktur sosial dimana individu berada, modal sosial bukan merupakan hak milik salah satu individu pun dalam struktur sosial, walaupun tiap-tiap individu mendapatkan kesempatan menikmati keuntungan atas kapital sosial yang ada (Coleman *dalam* Narayan 1999). Modal sosial hanya akan bermanfaat apabila didistribusikan antar individu dalam suatu struktur sosial. Modal sosial merupakan bagian dari struktur sosial yang mempunyai sifat "barang milik umum". Terdapat beragam pendekatan untuk memahami modal sosial. Sebagai contoh, Coleman mendefinisikan modal sosial sebagai bentuk tanggungjawab dan harapan; norma sosial dan saluran informasi. Selain itu modal sosial juga dapat ditelaah menggunakan dimensi kognitif dan struktural. Modal sosial dapat diwujudkan dalam bentuk yang sangat kompleks dan sering kali berupa fenomena abstrak seperti kepercayaan, nilai, norma kerjasama, jaringan formal maupun informal, lembaga yang efektif dan stabil serta kohesi sosial (Widodo 2008).

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pengembangan masyarakat hanya efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan beradab, manakala masyarakat secara nyata telah berpartisipasi. Masyarakat akan berpartisipasi apabila mereka berdaya untuk melaksanakannya. Masyarakat hanya akan berdaya dalam berpartisipasi apabila didukung oleh manusia-manusia atau individu masyarakat yang mandiri (autonomous). Penyuluhan merupakan pilar utama dalam mengembangkan

kemandirian individu masyarakat tersebut secara partisipatif, adil dan bermartabat (Sumardjo 1999; 2000).

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pengembangan kemandirian dan proses pemberdayaan (Craig & Mayo 1995; Hikmat 2004). Partisipasi masyarakat merupakan jaminan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan menyebabkannya dapat lebih mampu secara proporsional memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Semakin tinggi wawasan, keterampilan seseorang semakin termotivasi untuk semakin berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dan dengan intervensi pihak luar yang minimal, baik dalam mengidentifikasi kebutuhan, mengidentifikasi pilihan strategis, keputusan atau tindakan, memobilisasi sumber-sumber, maupun menggerakkan tindakan untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Intervensi pihak luar yang berlebihan dan tidak proporsional hanya akan menyebabkan ketidakberdayaan pada masyarakat, karena tidak terjadi proses pembelajaran diri atau proses pemberdayaan pada masyarakat itu sendiri.

Di era otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia, sudah saatnya penyuluhan di Indonesia kembali pada filosofi penyuluhan yang sebenarnya, yaitu mengembangkan partisipasi rakyat dalam pembangunan atas dasar manfaat yang akan diperoleh dan bukan atas dasar sekedar kerelaan berkorban. Prinsip pembangunan yang partisipatif menempatkan rakyat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Inisiatif dan kreatifitas rakyat ditempatkan sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama.

Partisipasi mengandung konotasi yang berbeda-beda untuk berbagai orang, sebagaimana terumus dalam pokok-pokok berikut (Ban & Hawkins 1996):

1. Sikap kerjasama petani dalam aktivitas perencanaan dan pelaksanaan program.
2. Pengorganisasian kegiatan-kegiatan penyuluhan oleh kelompok masyarakat (petani) dan memberi masukan kepada penyuluh, peneliti dan pihak-pihak terkait
3. Menyediakan informasi yang diperlukan untuk merencanakan program penyuluhan yang efektif.
4. Aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dalam organisasi jasa penyuluhan, mengenai tujuan, substansi dan metode, serta dalam evaluasi kegiatan.
5. Membiayai sebagian atau seluruh kegiatan yang dibutuhkan jasa penyuluhan.
6. Supervisi agen penyuluhan oleh anggota dewan pelaku utama (subyek pembangunan/ petani) yang mempekerjakannya.

Menurut Ban dan Hawkins dalam penyuluhan oleh PNS lebih memusatkan makna ke empat, yaitu partisipasi pelaku utama dalam pengambilan keputusan, tetapi tetap memperhatikan tafsiran kedua dan ketiga. Partisipasi menurut tafsiran keempat dan kelima terkait dengan keterlibatan penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta.

Ada beberapa alasan mengapa petani mesti berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program penyuluhan (Ban & Hawkins 1996):

1. Mereka memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang berhasil, termasuk tujuan, situasi, pengetahuan, serta pengalaman mereka dengan teknologi dan penyuluhan, maupun struktur sosial masyarakat mereka.
2. Mereka akan termotivasi untuk bekerjasama dalam program penyuluhan jika ikut bertanggungjawab di dalamnya.
3. Masyarakat yang demokratis pada umumnya menerima bahwa rakyat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai tujuan/ manfaat yang ingin mereka raih.
4. Banyak masalah-masalah pembangunan yang bersifat kompleks dan tidak mungkin lagi dipecahkan dengan pengambilan keputusan secara perorangan, misalnya pengendalian erosi/banjir, keberlanjutan sistem usahatani, pengelolaan kegiatan komersial dalam usaha pertanian dan sebagainya.

Partisipasi memungkinkan perubahan-perubahan yang lebih besar dalam cara berpikir manusia. Perubahan-perubahan melalui proses partisipasi lebih memberikan makna dan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan rakyat (masyarakat) sebagai subyek pembangunan atau subyek pengembangan masyarakat. Partisipasi di dalam perencanaan, penerapan/pelaksanaan, dan pengevaluasian program, serta pemanfaatan hasil program pembangunan memang diperlukan, karena akan meningkatkan motivasinya untuk bekerjasama dan menambah kesempatan untuk pengambilan keputusan kolektif. Partisipasi itu juga meningkatkan kekuatan masyarakat memperbaiki nasibnya sendiri. Partisipasi semacam itu tidak akan dapat dicapai dengan gaya kepemimpinan otoriter atau pendekatan pembangunan *top down*.

Prinsip-prinsip yang penting dalam pembangunan masyarakat antara lain: 1) keterpaduan pembangunan aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan pribadi/ spiritual; 2) mengatasi ketidakberdayaan struktural; 3) menjunjung hak asasi manusia; 4) keberlanjutan; 5) pemberdayaan; 6) kaitan masalah individual dan politik; 7) kepemilikan oleh komunitas; 8) kemandirian; 9) ketidaktergantungan pada pihak lain termasuk pemerintah; 10) keterkaitan jangka pendek dan menengah; 11) pembangunan yang bersifat organik dan bukan mekanistik; 12) kecepatan pembangunan ditentukan sendiri oleh masyarakat; 13) pengalaman pihak luar diadaptasi sesuai kondisi lokal; 14) proses sama pentingnya dengan hasil pembangunan; dan 15) prinsip lainnya seperti proses tanpa paksaan, partisipatif, inklusif, kooperatif, serta pengambilan keputusan secara demokratis, dialogis dan berdasarkan konsensus.

Pentingnya Mengembangkan Energi Sosial Budaya Kreatif

Kegiatan memberdayakan masyarakat berlangsung baik apabila ditempuh dengan mengembangkan potensi energi sosial kreatif ini. Pendekatan yang ditempuh dengan membuka wawasan para tokoh dan masyarakat pada umumnya melalui komunikasi dan penyebaran informasi tentang ide pemecahan masalah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Energi sosial budaya kreatif meliputi tiga komponen utama, yaitu: *ideals*, *ideas*, dan *friendship* (Sumardjo 1992).

Terbukanya wawasan melalui proses komunikasi tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan *ideals* suatu kondisi yang diidealkan dan menjadi kebutuhan masyarakat untuk mewujudkannya. *Ideals* ini dapat menumbuhkan sikap positif terhadap upaya meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat, serta sikap

positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik yang sangat kuat. Motivasi intrinsik ini mendorong upaya terwujudnya harapan atau *ideals* yang telah terbentuk dalam masyarakat.

Terbukanya wawasan akan menumbuhkan inspirasi tentang *ideas*, yaitu gagasan bagaimana mewujudkan ide tersebut. Kejelasan harapan dan cara mewujudkan harapan tersebut, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi solidaritas atau *friendship* untuk secara sinergis terjadi kerjasama diantara warga masyarakat. Menurut Margono Slamet (Sumardjo 2008), prasyarat untuk terjadinya partisipasi meliputi tiga aspek, yaitu: adanya kesempatan, kemauan dan kemampuan.

Masyarakat akan berpartisipasi dalam upaya bersama mewujudkan harapan bersama tersebut apabila terkondisi adanya prasyarat untuk terjadinya partisipasi berikut:

1. Adanya kesempatan, yaitu adanya kesadaran masyarakat tentang peluang untuk dapat berpartisipasi. Kesadaran bahwa harapan yang terbangun juga perlu dicapai, karena bila harapan tersebut tercapai masyarakat merasakan manfaat yang besar.
2. Adanya kemauan, yaitu keinginan atau sikap positif terhadap harapan (*ideals*) dan terwujudnya harapan itu, sehingga sikap ini akan mendorong tindakan masyarakat untuk mewujudkan harapan bersama tersebut.
3. Kemampuan, yaitu adanya kesadaran masyarakat bahwa dirinya merasa memiliki kemampuan untuk meraih kesempatan, serta dengan kemauan yang kuat untuk mewujudkan harapan tersebut. Kemampuan itu antara lain ditandai dengan kepemilikan keterampilan, tenaga, pikiran, dana dan materi untuk dapat berpartisipasi mewujudkan harapan masyarakat bersama.

Penyuluhan, pendampingan, fasilitator pemberdayaan, advokasi atau apapun bentuknya, disarankan mengenali potensi energi sosial ini, dan mengembangkannya. Dengan demikian suatu program pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, didukung secara moral oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat, serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Program-program pembangunan seperti itulah yang cenderung mendapat partisipasi masyarakat yang tinggi dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Persoalannya adalah bagaimana gagasan mengenai kesejahteraan bersama itu masih melembaga dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus sering ditemukan kesenjangan antara gagasan dengan realitas. Dengan semakin terbukanya desa, kadar solidaritas sosial lokal juga semakin menipis. Namun, diantara kondisi seperti itu, perlu digali adanya solidaritas sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan antara gagasan dengan realitas, sehingga dapat terjembatani ide-ide (*ideas*) kemakmuran bersama diantara warga masyarakat, sehingga menjadi persepsi bersama dan menjadi suatu idealisme bersama (*ideals*). Apabila di dalam masyarakat telah ada sesuatu kondisi yang diidealkan, maka besar peluang untuk mengembangkan solidaritas sosial dan kerjasama diantara masyarakat (*friendships*), untuk mewujudkan suatu kondisi idaman bersama tadi.

KESIMPULAN

Dalam menyongsong era globalisasi dan era lepas landas, setiap bangsa memerlukan SDM yang memiliki keunggulan prima: manusia yang memiliki kualitas tinggi yaitu di samping menguasai iptek juga harus memiliki sikap mental dan *soft skill* sesuai dengan kompetensinya. Modal sosial yang besar harus dapat diubah menjadi suatu aset yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Upaya peningkatan kapasitas modal sosial dan kualitas pendamping pengembangan masyarakat berkelanjutan perlu dilaksanakan secara spesifik lokasi dan mengedepankan aspek pengembangan energi sosial budaya alam.

Modal sosial dan pengetahuan lokal merupakan aspek kunci dalam pengembangan masyarakat dan dalam pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Penyuluh atau fasilitator pemberdaya masyarakat adalah salah satu aktor kunci komunikasi pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan tersebut. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pengembangan kemandirian dan proses pemberdayaan. Partisipasi masyarakat merupakan jaminan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan menyebabkannya lebih mampu secara proporsional memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Semakin tinggi wawasan, ketrampilan seseorang, maka semakin termotivasi untuk semakin berpartisipasi dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ban VDAW, Hawkins HS. 1996. *Agricultural Extension* (second edition). Blackwell Science, Osney Mead, Oxford OX2 OEL.
- Coleman J. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology Supplement* 94: S95-S120.
- Craig G, Mayo (ed.) 1995. *Community Empowerment: A Reader in Participation and Development*. Zed Books. London.
- Dasgupta P. 1997. *Social Capital and Economic Performance*. Washinton DC: The World Bank.
- Ghosh PK. 1984. *Third World Development: A Basic Needs Aproach*. Westport: Greenwood Press.
- Hikmat H. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Narayan D. 1999. Bonds and Bridges; Social Capital and Poverty. Washinton DC: World Bank.
- Putnam RD. 1995. Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy* Vol. 6 (1995) 1, 64-78.
- Sumardjo. 1992. Pembangunan dan Kemiskinan di Timor Tengah Selatan. Dalam Sayogyo (penyunting) "Pembangunan dan Kemiskinan di Propinsi Nusa Tenggara Timar". Yogyakarta: Gama Press.
- _____. 1999. Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.

- _____. 2000. Mencari Bentuk Pengembangan Sumberdaya Manusia Mandiri dalam Pertanian Berbudaya Industri di Era Globalisasi. Hasil Penelitian Hibah Bersaing Kerjasama IPB dengan Dirjen Dikti Depdiknas RI. Bogor.
- _____. 2006. Kompetensi Penyuluh. Makalah disampaikan dalam rapat koordinasi Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional, Batam.
- _____. 2007. Metoda Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat. Magister Profesional Pengembangan Masyarakat, Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- _____. 2008. Penyuluhan Pembangunan sebagai Pilar Pendukung Kemajuan dan Kemandirian Masyarakat. Dalam Sudrajat dan Yustina "Pemberdayaan Manusia Pembangunan yang Bermartabat". Sydex Plus. Bogor.
- _____. 2009. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Agribisnis. Makalah dalam Kuliah Umum Di Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang. Banten.
- Todaro PM, Stephen. 2009. *Economic Development*. Tenth Edition. New York: Pearson, Addison Wesley.
- UNDP. 2003. *Human Development Report, 2003: Mellenium Development Goals: A Compact among Nations to End Human Poverty*. New York: Oxford University Press.
- Widodo S. 2008. Kelembagaan Kapital Sosial dan Pembangunan. [terhubung berkala]. <http://learning-of.slametwidodo.com/2008/02/01/kelembagaan-kapital-sosial-dan-pembangunan/>